

Proceeding Call for Papers
pada Simposium dan Pelatihan
Hukum Pidana ke-V

Revitalisasi Hukum Pidana Adat Dan Kriminologi Kontemporer



Diselenggarakan atas kerjasama
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

Proceeding Call for Papers
pada Simposium dan Pelatihan
Hukum Pidana ke-V

Revitalisasi Hukum Pidana Adat
Dan Kriminologi Kontemporer

GENTA
PUBLISHING

Literatur Hukum Indonesia

Proceeding Call for Papers pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana ke-V

REVITALISASI HUKUM PIDANA ADAT DAN KRIMINOLOGI KONTEMPORER

© Program Doktor (s3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhamamdiyah Surakarta

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Cetakan I, 2018

Penulis : Ani Triwati, *et. all*
Editor : Ermania Widjajanti
A. Irzal Rias
Penata Letak & : Ibnu Teguh
Perancang Sampul
Pracetak : Ridwan
Supervisi : Ufran
Foto Cover : Bangsawan Suku Sasak, Lombok 1870
(sumber: Tropenmuseum)

Diterbitkan oleh:

GENTA
PUBLISHING

Perum Pring Mayang Regency

2 Kav. 4

Jl. Rajawali Gedongan Baru

Banguntapan, Bantul-Yogyakarta

INDONESIA

Telp. 081 332 732 896

WA. 081 2378 18611

BBM. 5BDAAE37

E-mail: redaksigenta@yahoo.com

Bekerjasama :

Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

REVITALISASI HUKUM PIDANA ADAT DAN KRIMINOLOGI KONTEMPORER

Yogyakarta: GENTA Publishing 2018

xiv + 800 hlm. : 17 X 24 cm

ISBN: 978-602-1500-93-4

PENGANTAR

Prosiding ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan dari para peserta *Call for Papers* dalam kegiatan Simposium & Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan pada tanggal 1-6 April 2018. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang diikuti oleh dosen hukum pidana dan kriminologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam organisasi profesi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).

MAHUPIKI sering mengadakan kegiatan serupa seperti ini, setidaknya satu tahun sekali rutin diadakan, guna memberikan wadah pertemuan bagi para dosen dan praktisi hukum dalam menyikapi berbagai perkembangan hukum pidana dan kriminologi dalam praktik. *Call for Papers* ini diharapkan sebagai media bagi para dosen hukum pidana dan kriminologi untuk mengemukakan ide pemikirannya dalam perkembangan hukum pidana dan kriminologi.

Saya selaku ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap rekan-rekan anggota MAHUPIKI yang telah meluangkan waktu, menyampaikan pemikiran-pemikiran atau masalah hukum pidana dan kriminologi di Indonesia dalam kegiatan *Call for Paper* ini. Saya mengharapkan pemikiran rekan-rekan anggota MAHUPIKI dalam prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kebijakan hukum pidana dan riset kriminologi di Indonesia masa mendatang. Amin...

Jakarta, April 2018

Ketua Umum MAHUPIKI

Romli Atmasasmita

DAFTAR ISI

PENGANTAR MAHUPIKI	v
PENGANTAR EDITOR.....	vii
DAFTAR ISI	ix

Sub Tema 1

Hukum Pidana Adat.....	1
1. Hukum Pidana Adat Sebagai Sarana Mewujudkan Nilai Keadilan Pancasila Oleh: <i>Ani Triwati</i>	3
2. Re-evaluasi Urgensi Pidana Tambahan “Pemenuhan Kewajiban Adat” Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh: <i>Antonius PS. Wibowo</i>	18
3. Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Praktiknya Di Sumatera Barat Oleh: <i>Aria Zurnetti</i>	38
4. Kedudukan Dan Fungsi Peradilan Pidana Adat Di Papua Oleh: <i>Basir Rohrohmana</i>	54
5. Pengembangan Bentuk Pidana Adat Dalam Pemidanaan Baru Dan Penerapan Di Indonesia Oleh: <i>Dian Narwastuty</i>	68
6. Konsep Penjatuhan Pidana Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP Dikaitkan Dengan <i>Just Desert Principle</i> Dalam Prinsip Pemidanaan Oleh: <i>Erika Magdalena Chandra</i>	77
7. Konsep Diversi Dalam Masyarakat Adat Suku Sasak Di Lombok Sebagai Upaya Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh: <i>Ermania Widjajanti</i>	92
8. Urgensinya Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana (Dalam Mendukung <i>Restoratif Justice</i>) Oleh: <i>Ferdricka Nggeboe</i>	107
9. Perbandingan Hukum Pidana Dengan Hukum Adat (Proses Penyelesaian Tindak pidana Pembunuhan Secara Hukum Adat Dayak U’ud Danum Di Desa Menantak Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang) Oleh: <i>FX.Nikolas</i>	121
10. Kontradiktif Perselingkuhan Dalam Perspektif Orang Madura Dan Pasal 284 KUHP Oleh: <i>Hendrik, Budimansyah, Henny Damaryanti</i>	135

11. Sangsi Adat Ngampang Pada Masyarakat Adat Dayak Kebahan Kalimantan Barat (Suatu Pendekatan Yuridis Normatif) Oleh: <i>Henny Damaryanti, Hendrik, Rinto</i>	149
12. Eksistensi Hukum Pidana Adat Bali Lokika Sanggraha Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia (KUHP) Oleh: <i>I Made Sepud</i>	159
13. Penggunaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana Adat Di Indonesia Oleh: <i>Joice Soraya</i>	174
14. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Kasus Pencurian Di Suku Sasak Sade Lombok Oleh: <i>Kurnia Dewi Anggraeny</i>	197
15. Peran <i>Begundem</i> di Masyarakat Adat Sasak Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh: <i>Laely Wulandari</i>	212
16. LGBT Menurut Hukum Pidana Lokal Dan Bandingannya Dengan KUHP Oleh: <i>M. Hamdan</i>	229
17. Penggalian Falsafah Tujuan Pemidanaan Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Undang-Undang Simbur Cahaya Oleh: <i>Mahmud Mulyadi</i>	245
18. Sanksi Adat Sebagai Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif dan <i>Ius Constituendum</i> Oleh: <i>Maria Ulfah</i>	260
19. Positifisasi Hukum Pidana Adat Di Aceh Oleh: <i>Mohd. Din</i>	274
20. Kajian Yuridis Asas Legalitas Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia Oleh: <i>Mufatikhatul Farikhah</i>	289
21. Kebijakan Hukum Pidana Adat Berdasarkan Serat Angger Pradata Awal Dan Pradata Akhir Di Kraton Yogyakarta Oleh: <i>Mufti Khakim</i>	307
22. Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Peradilan Adat Di Indonesia Oleh: <i>Nur Rochaeti</i>	326
23. Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia : Kajian Terhadap Konsep Hukum Yang Hidup Dalam Pasal 2 RUUHP Oleh: <i>Nella Sumika Putri</i>	340
24. Pemanfaatan Serta Optimalisasi Penggunaan Hukum Pidana Secara Adat Dalam Menciptakan Keadilan Bagi Korban Dan Pelaku Oleh: <i>Neo Adhi Kurniawan</i>	359

11. Sangsi Adat Ngampang Pada Masyarakat Adat Dayak Kebahan Kalimantan Barat (Suatu Pendekatan Yuridis Normatif) Oleh: <i>Henny Damaryanti, Hendrik, Rinto</i>	149
12. Eksistensi Hukum Pidana Adat Bali Lokika Sanggraha Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia (KUHP) Oleh: <i>I Made Sepud</i>	159
13. Penggunaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana Adat Di Indonesia Oleh: <i>Joice Soraya</i>	174
14. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Kasus Pencurian Di Suku Sasak Sade Lombok Oleh: <i>Kurnia Dewi Anggraeny</i>	197
15. Peran <i>Begundem</i> di Masyarakat Adat Sasak Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh: <i>Laely Wulandari</i>	212
16. LGBT Menurut Hukum Pidana Lokal Dan Bandingannya Dengan KUHP Oleh: <i>M. Hamdan</i>	229
17. Penggalian Falsafah Tujuan Pemidanaan Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Undang-Undang Simbur Cahaya Oleh: <i>Mahmud Mulyadi</i>	245
18. Sanksi Adat Sebagai Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif dan <i>Ius Constituendum</i> Oleh: <i>Maria Ulfah</i>	260
19. Positifisasi Hukum Pidana Adat Di Aceh Oleh: <i>Mohd. Din</i>	274
20. Kajian Yuridis Asas Legalitas Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia Oleh: <i>Mufatikhatul Farikhah</i>	289
21. Kebijakan Hukum Pidana Adat Berdasarkan Serat Angger Pradata Awal Dan Pradata Akhir Di Kraton Yogyakarta Oleh: <i>Mufti Khakim</i>	307
22. Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Peradilan Adat Di Indonesia Oleh: <i>Nur Rochaeti</i>	326
23. Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia : Kajian Terhadap Konsep Hukum Yang Hidup Dalam Pasal 2 RUUHP Oleh: <i>Nella Sumika Putri</i>	340
24. Pemanfaatan Serta Optimalisasi Penggunaan Hukum Pidana Secara Adat Dalam Menciptakan Keadilan Bagi Korban Dan Pelaku Oleh: <i>Neo Adhi Kurniawan</i>	359

11. Sangsi Adat Ngampang Pada Masyarakat Adat Dayak Kebahan Kalimantan Barat (Suatu Pendekatan Yuridis Normatif) Oleh: <i>Henny Damaryanti, Hendrik, Rinto</i>	149
12. Eksistensi Hukum Pidana Adat Bali Lokika Sanggraha Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia (KUHP) Oleh: <i>I Made Sepud</i>	159
13. Penggunaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana Adat Di Indonesia Oleh: <i>Joice Soraya</i>	174
14. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Kasus Pencurian Di Suku Sasak Sade Lombok Oleh: <i>Kurnia Dewi Anggraeny</i>	197
15. Peran <i>Begundem</i> di Masyarakat Adat Sasak Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh: <i>Laely Wulandari</i>	212
16. LGBT Menurut Hukum Pidana Lokal Dan Bandingannya Dengan KUHP Oleh: <i>M. Hamdan</i>	229
17. Penggalian Falsafah Tujuan Pemidanaan Indonesia Berbasis Kearifan Lokal Undang-Undang Simbur Cahaya Oleh: <i>Mahmud Mulyadi</i>	245
18. Sanksi Adat Sebagai Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif dan <i>Ius Constituendum</i> Oleh: <i>Maria Ulfah</i>	260
19. Positifisasi Hukum Pidana Adat Di Aceh Oleh: <i>Mohd. Din</i>	274
20. Kajian Yuridis Asas Legalitas Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia Oleh: <i>Mufatikhatul Farikhah</i>	289
21. Kebijakan Hukum Pidana Adat Berdasarkan Serat Angger Pradata Awal Dan Pradata Akhir Di Kraton Yogyakarta Oleh: <i>Mufti Khakim</i>	307
22. Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Peradilan Adat Di Indonesia Oleh: <i>Nur Rochaeti</i>	326
23. Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia : Kajian Terhadap Konsep Hukum Yang Hidup Dalam Pasal 2 RUUHP Oleh: <i>Nella Sumika Putri</i>	340
24. Pemanfaatan Serta Optimalisasi Penggunaan Hukum Pidana Secara Adat Dalam Menciptakan Keadilan Bagi Korban Dan Pelaku Oleh: <i>Neo Adhi Kurniawan</i>	359

25. Melampaui Kewenangan Mengadili (Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat di Aceh) Oleh: <i>Nursiti</i>	374
26. Eksistensi dan Keberlakuan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Oleh: <i>Pujiyono</i>	396
27. “ <i>Silih Hampura</i> ” Dalam Hukum Pidana Adat Baduy Oleh: <i>Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa</i>	409
28. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Adat, Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Adat Tulikup Dengan Desa Adat Sidan Di Kabupaten Gianyar Oleh: <i>Yuli Utomo</i>	421

Sub Tema 2

Tindak Pidana Korporasi	435
1. Penanganan Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Korupsi Suatu Perusahaan Oleh: <i>Ahmat</i>	437
2. Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara yang Berlatar Belakang Konflik Antara Masyarakat dengan Korporasi Oleh: <i>Aloysius Wisnubroto</i>	452
3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menentukan Kesalahan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh: <i>Arif Rohman</i>	467
4. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Badan Usaha <i>Comanditaire</i> <i>Venootschaap</i> (CV) Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh: <i>Herlina Manullang</i>	481
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hilangnya Nyawa Manusia Akibat Lubang Pascatambang Batubara Di Kalimantan Timur Oleh: <i>Ivan Zairani Lisi</i>	500
6. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kooporasi Oleh: <i>Jeanne Darc Noviayanti Manik</i>	517
7. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Pemidanaannya Oleh: <i>July Esther</i>	532
8. Pemisahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Oleh: <i>Nani Mulyati</i>	552
9. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Oleh: <i>Sukmareni</i>	573

25. Melampaui Kewenangan Mengadili (Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat di Aceh) Oleh: <i>Nursiti</i>	374
26. Eksistensi dan Keberlakuan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Oleh: <i>Pujiyono</i>	396
27. “ <i>Silih Hampura</i> ” Dalam Hukum Pidana Adat Baduy Oleh: <i>Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa</i>	409
28. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Adat, Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Adat Tulikup Dengan Desa Adat Sidan Di Kabupaten Gianyar Oleh: <i>Yuli Utomo</i>	421

Sub Tema 2

Tindak Pidana Korporasi	435
1. Penanganan Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Korupsi Suatu Perusahaan Oleh: <i>Ahmat</i>	437
2. Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara yang Berlatar Belakang Konflik Antara Masyarakat dengan Korporasi Oleh: <i>Aloysius Wisnubroto</i>	452
3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menentukan Kesalahan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh: <i>Arif Rohman</i>	467
4. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Badan Usaha <i>Comanditaire</i> <i>Venootschaap</i> (CV) Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh: <i>Herlina Manullang</i>	481
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hilangnya Nyawa Manusia Akibat Lubang Pascatambang Batubara Di Kalimantan Timur Oleh: <i>Ivan Zairani Lisi</i>	500
6. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kooporasi Oleh: <i>Jeanne Darc Noviayanti Manik</i>	517
7. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Pemidanaannya Oleh: <i>July Esther</i>	532
8. Pemisahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Oleh: <i>Nani Mulyati</i>	552
9. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Oleh: <i>Sukmareni</i>	573

10. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Oleh: <i>Titik Suharti</i>	592
11. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang Undang Mineral Dan Batubara Oleh: <i>Toetik Rahayuningsih</i>	606
12. Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Korporasi Oleh: <i>Umi Enggarsasi</i>	621
13. Kejahatan Korporasi Dalam Konteks Studi Kriminologi (Studi Dari Pelaku Kejahatan Lingkungan Dalam Kriminologi) Oleh: <i>Vinita Susanti</i>	643
14. Pendekatan <i>Deferred Prosecution Agreements</i> (DPAs) dan <i>Non-Prosecution Agreements</i> (NPAs) Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana: Studi Perbandingan Dengan ketentuan PERMA No. 13 Tahun 2016 Oleh: <i>Wanodyo Sulistyani</i>	659
15. Penerapan Mediasi Penal Berbasis <i>Economic Analysis Of Law</i> Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Oleh: <i>Zulkarnain</i>	673

Sub Tema 3

Tindak Pidana Malpraktek	691
1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Malpraktik Medis Oleh: <i>Anny Retnowati</i>	693
2. Tindakan Sunat (<i>Sirkumsisi</i>) Oleh Tenaga Keperawatan Dalam Perspektif Malpraktik Oleh: <i>Astutik dan Prilian Cahyani</i>	707
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Oleh: <i>Henny Saida Flora</i>	722
4. Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Malpraktek Oleh: <i>G. Widiartana dan P. Prasetyo Sidi Purnomo</i>	739
5. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Korban Pelecehan Seksual Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Oleh: <i>Siska Elvandari dan Mey Lin Chan</i>	752
6. Malpraktik Dalam Hubungan Dengan Prinsip <i>Agroti Salus Lex Suprema</i> Oleh: <i>Syafruddin</i>	771
7. Prevensi Tuntutan Dugaan Malpraktik Kedokteran Dengan Strategi Komunikasi Berbasis <i>Patient Centered</i> Oleh: <i>Trini Handayani</i>	783

10. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Oleh: <i>Titik Suharti</i>	592
11. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang Undang Mineral Dan Batubara Oleh: <i>Toetik Rahayuningsih</i>	606
12. Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Korporasi Oleh: <i>Umi Enggarsasi</i>	621
13. Kejahatan Korporasi Dalam Konteks Studi Kriminologi (Studi Dari Pelaku Kejahatan Lingkungan Dalam Kriminologi) Oleh: <i>Vinita Susanti</i>	643
14. Pendekatan <i>Deferred Prosecution Agreements</i> (DPAs) dan <i>Non-Prosecution Agreements</i> (NPAs) Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana: Studi Perbandingan Dengan ketentuan PERMA No. 13 Tahun 2016 Oleh: <i>Wanodyo Sulistyani</i>	659
15. Penerapan Mediasi Penal Berbasis <i>Economic Analysis Of Law</i> Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Oleh: <i>Zulkarnain</i>	673

Sub Tema 3

Tindak Pidana Malpraktek	691
1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Malpraktik Medis Oleh: <i>Anny Retnowati</i>	693
2. Tindakan Sunat (<i>Sirkumsisi</i>) Oleh Tenaga Keperawatan Dalam Perspektif Malpraktik Oleh: <i>Astutik dan Prilian Cahyani</i>	707
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Oleh: <i>Henny Saida Flora</i>	722
4. Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Malpraktek Oleh: <i>G. Widiartana dan P. Prasetyo Sidi Purnomo</i>	739
5. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Korban Pelecehan Seksual Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Oleh: <i>Siska Elvandari dan Mey Lin Chan</i>	752
6. Malpraktik Dalam Hubungan Dengan Prinsip <i>Agroti Salus Lex Suprema</i> Oleh: <i>Syafruddin</i>	771
7. Prevensi Tuntutan Dugaan Malpraktik Kedokteran Dengan Strategi Komunikasi Berbasis <i>Patient Centered</i> Oleh: <i>Trini Handayani</i>	783

PEMISAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS KORPORASI

Abstrak

Semakin kompleks dan majunya kehidupan sosial dan ekonomi maka akan semakin besar juga peran korporasi di dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan perannya korporasi dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, pada umumnya saat ini hukum pidana di Indonesia belum menerima pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi sudah dimungkinkan pada beberapa UU khusus. Penerimaan korporasi sebagai subjek hukum pidana juga sudah diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sehingga apabila RKUHP ini disahkan nantinya maka korporasi akan menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di samping manusia terhadap semua bentuk tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP. Ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi, maka akan terdapat dualisme pertanggungjawaban pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana individu pengurus korporasi. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada suatu tindak pidana korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan bahwa ada individu tertentu di dalam korporasi yang menyebabkan atau setidaknya memicu terjadinya tindak pidana tersebut. Namun kedua subjek hukum ini akan berbeda, kesalahan salah satu subjek hukum tidak dapat direduksi menjadi kesalahan subjek hukum yang lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum pidana menganut prinsip "*personal liability*" dalam mempertanggungjawabkan suatu subjek. Pada beberapa sistem hukum di Indonesia, hakim seperti memperlakukan kedua subjek hukum ini dapat dipertukarkan (*interchangeable*) dalam hal penuntutan dan penjatuan sanksi. Paper ini akan melakukan analisis mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam hal terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*legislation approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Paper ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi, aparat penegak hukum dalam mengadili kasus hukum yang melibatkan tindak pidana korporasi, di samping itu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur hukum pidana di Indonesia.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggung jawaban pidana, kesalahan individu

A. Pendahuluan

Korporasi telah menjadi ciri utama dari masyarakat modern. Semakin kompleks kehidupan masyarakat maka semakin besar peran korporasi. Saat ini sangat banyak

¹ Dosen di bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, master di Melbourne University dan doktor dari Universitas Indonesia. Dapat dihubungi melalui email: natnoey@gmail.com.

untuk mengidentifikasi korporasi yang ada di setiap tingkat sosial. Mulai dari urusan pemerintahan, ekonomi dan perdagangan, pendidikan dan budaya, lebih banyak dilakukan oleh korporasi daripada dilakukan oleh orang perorangan. Korporasi merupakan bentuk organisasi yang dijelaskan oleh Schein sebagai *"the rational coordination of the activities of a number of people for the achievement of some common explicit purpose or goal, through division of labor or function, and through a hierarchy of authority and responsibility."*² (koordinasi rasional dari aktifitas beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan yang sama dan eksplisit, melalui pembagian kerja atau fungsi, dan melalui hirarki wewenang dan tanggung jawab.) Dari definisi ini jelas bahwa korporasi memiliki tujuan sendiri yang berbeda dengan tujuan dari orang perorangan yang ada di dalamnya, dan dalam mencapai tujuan dari korporasi mereka menggunakan suatu koordinasi rasional yang mengarah kepada pencapaian tujuan tersebut.

Dalam melakukan aktifitasnya untuk mencapai tujuan tertentu, korporasi dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mengandung sanksi pidana. Perbuatan inilah yang disebut sebagai tindak pidana korporasi atau *corporate crime*. Beberapa literatur hukum juga menyebutnya sebagai *organizational crime*.³ Schrager dan Short menjelaskan Organizational Crime sebagai *"Illegal acts of omission or commission of an individual or a group of individuals in a legitimate formal organization in accordance with the operative goals of the organization, which have serious physical or economic impact on employees, consumers or the general public."*⁴ (Tindakan melawan hukum baik berupa omisi maupun komisi dari seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi formal yang sah sesuai dengan tujuan operasi organisasi, yang memiliki dampak fisik atau ekonomi yang serius terhadap karyawan, konsumen atau masyarakat umum).

Saat ini di Indonesia pertanggungjawaban pidana korporasi belum berlaku secara umum, karena KUHP yang saat ini dianut di Indonesia masih belum menerima pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diterima pada beberapa undang-undang khusus (undang-undang di luar KUHP yang mengandung sanksi pidana). Pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterima misalnya pada UU tentang Psikotropika, UU tentang Narkotika, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU tentang

² Dikutip dari John McAuley, Joanne Duberley and Phil Johnson, *Organization Theory: Challenges and Perspectives*, (England: Pearson Education, 2007), hlm. 12.

³ Istilah *organizational crime* dipakai misalnya oleh Albert J. Reiss, Jr. dan Michael Tonry, "Organizational Crime," *Crime and Justice*, vol. 18, 1993, hlm. 1-10. Shover, Neal, and Andy Hochstetler (2002) "Cultural Explanation and Organizational Crime." *Crime, Law, and Social Change*, vol. 37, hlm. 1-18. Ling Zhang, *The Comparative Research of Organizational Crime in Japan and China* (2004, Japanese).

⁴ Schrager dan Short, "Toward a Sociology of Organizational Crime," *Social Problem*, vol. 25, issue 4, 1978, hlm. 411-412.

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan sebagainya. Hampir semua UU yang baru terbit setelah tahun 2000-an juga sudah menerima korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana di samping manusia. Misalnya UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,⁵ UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,⁶ UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,⁷ UU No. 13/2016 Tentang Paten,⁸ UU No. 7/2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,⁹ dan sebagainya.

RKUHP yang sudah dibahas semenjak puluhan tahun silam telah juga menerima pertanggungjawaban pidana korporasi.¹⁰ Pada Pasal 48 RKUHP disebutkan bahwa “korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Kemudian Pasal 214 RKUHP mengartikan korporasi adalah bagian dari makna setiap orang. Ketentuan tersebut berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.” Apabila RKUHP ini telah disahkan, maka konsekuensinya adalah bahwa korporasi dianggap sebagai subjek hukum terhadap semua bentuk tindak pidana yang diatur di dalam RKUHP tersebut. Dapat disimpulkan bahwa di masa yang akan datang pertanggungjawaban pidana korporasi akan semakin banyak diimplementasikan dalam berbagai tindak pidana di Indonesia. Terutama untuk tindak pidana yang bersifat merugikan masyarakat secara luas seperti tindak pidana lingkungan dan korupsi.

Hal ini juga dapat diamati dari kasus hukum tindak pidana korporasi yang saat ini ada di Indonesia kebanyakan adalah kasus tindak pidana lingkungan sebanyak 4 kasus, kasus tindak pidana korporasi sebanyak 4 kasus, satu kasus tindak pidana perpajakan dan satu kasus tindak pidana terorisme.¹¹ Dari kesepuluh kasus hukum di atas, tidak semua berangkat dari penuntutan terhadap korporasi, enam kasus hukum berawal dari penuntutan terhadap pengurus korporasi. Namun dalam putusannya, hakim juga memberikan sanksi pidana bagi korporasi. Bahkan ada satu kasus tindak

⁵ Pasal 1 (14) menjelaskan pengertian setiap orang adalah “orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum”. Ketentuan pidana diatur pada Bab VIII (Pasal 55 – 58) yang ditujukan kepada setiap orang.

⁶ Pasal 1 (19) menjelaskan pengertian orang adalah “orang perseorangan dan/atau korporasi.” Sedangkan ketentuan pidana diatur pada Bab IX (Pasal 79-87) yang ditujukan kepada setiap orang.

⁷ Ps. 1 (17): setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Ketentuan pidana diatur pada Bab IX (Pasal 144-145) yang ditujukan kepada setiap orang.

⁸ Ps. 1 (13): orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan pidana diatur pada Bab XVII (Ps. 161 – Ps. 166), yang ditujukan kepada setiap orang.

⁹ Ps. 1 (26): setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. BAB IX (Ps. 73-74): mengatur tindak pidana yang dipaparkan bagi “setiap orang” yang termasuk di dalamnya adalah korporasi.

¹⁰ Departemen Hukum dan HAM, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2015.

¹¹ Nani Mulyati, “Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia,” Disertasi Universitas Indonesia, 2018, hlm. 294-295.

pidana lingkungan hidup yang menjadi tersangka dan terdakwa adalah korporasi, tetapi pengurus pengendali dalam hal ini *managing director* yang mewakili korporasi pada saat persidangan diberikan sanksi pidana pengganti berupa kurungan apabila korporasi tidak dapat membayar pidana denda yang diberikan kepada korporasi.¹²

Hakim dan aparat penegak hukum dalam beberapa kasus hukum yang melibatkan korporasi seperti memperlakukan korporasi dan pengurus pengendali korporasi sebagai dapat dipertukarkan (*interchangeable*) dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal (*personal liability*) dan penjatuhan sanksi yang bersifat individual (*individual nature of penalties*),¹³ yang mana menurut prinsip ini seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya.¹⁴

Dari latar belakang tersebut di atas, paper ini melakukan analisis mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana individu pengurus korporasi dalam hal terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi. Metode penelitian yang diadopsi adalah yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*legislative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Paper ini disusun dalam empat subbab. Subbab pertama adalah pendahuluan yang menerangkan secara singkat latar belakang penelitian yang dilakukan. Subbab kedua adalah pembahasan yang terdiri dari lima bagian. Bagian pertama membahas tentang kepribadian korporasi (*corporate personality*), selanjutnya pada bagian kedua dilakukan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal, diikuti dengan analisis pertimbangan hakim Indonesia dalam kasus hukum mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan/atau pengurusnya dalam hal terjadi tindak pidana yang melibatkan korporasi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi. Bagian terakhir adalah kesimpulan atau penutup.

B. Pembahasan

1. Korporasi sebagai Realitas Sosial

Sebelum membahas mengenai pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal, akan dilakukan terlebih dahulu pembahasan mengenai kepribadian korporasi (*corporate personality*) untuk menganalisis bagaimana korporasi berbeda dari

¹² *Indonesia v PT. Adei Plantation & Industry* (PT. API). Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Putusan No. 286/Pid.Sus/2014/PT.PBR, hlm. 53.

¹³ Juliette Tricot, "Corporate Liability and Compliance Programs in France," dalam Manacorda, Centonze dan Forti (editor), *Preventing Corporate Corruption: The Anti-Bribery Compliance Model*, (Switzerland: Springer, 2014), hlm. 481.

¹⁴ Katrin Deckert, "Corporate Criminal Liability in France," dalam Mark Pieth dan Radha Ivory (editor), *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence and Risk*, (London: Springer, 2011), hlm. 151.

anggota-anggota yang ada di dalamnya, di mana mereka dilihat sebagai suatu entitas mandiri yang berbeda dengan pengurusnya. Terdapat paling tidak tiga pendekatan yang menjelaskan kenapa korporasi dapat dipandang sebagai suatu pribadi yang mandiri, yaitu: pandangan formalis, pandangan reduksionis dan pandangan realis.

Para penganut pandangan formalis tentang kepribadian korporasi menjelaskan bahwa korporasi sebagai subjek hukum adalah merupakan suatu konstruksi dari hukum.¹⁵ Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum yang memperoleh status hukum dengan cara inkorporasi atau pendirian. Proses inkorporasi ini merupakan monopoli yang dikuasai oleh negara, hanya negara yang bisa menginkorporasi group dan memberikan mereka personalitas hukum dengan memberikan hak dan kewajiban.¹⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korporasi adalah hasil ciptaan negara, kehendaknya adalah kehendak yang didelegasikan, tujuannya ada karena telah mendapat pengakuan dari negara.¹⁷ Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka seperti penciptaannya, maka kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹⁸

Pandangan selanjutnya adalah yang menyatakan bahwa korporasi adalah agregat atau kumpulan dari individu, interaksi yang terjadi antara individu dalam entitas tersebut atau sebagai kontrak yang dibuat oleh individu-individu tersebut untuk mencapai serta dalam suatu tujuan bersama yang ditentukan oleh individu-individu tersebut secara suka rela. Menurut pandangan reduksionis, perilaku suatu korporasi adalah merupakan agregat dari perilaku individu yang ada di dalam korporasi; atau hubungan sebab dan akibat antara perilaku-perilaku individu dengan konsekuensi (baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan) dari perilaku tersebut.¹⁹

Pandangan terakhir adalah pandangan realis yang menjelaskan bahwa korporasi tidak dapat membuat sendiri subjeknya, namun hanya mengakui fakta sosial yang memenuhi syarat menurut hukum sehingga korporasi merupakan hasil dari tindakan sosial tertentu yang kemudian memiliki personalitas *de facto*, yang kemudian korporasi mendeklarasikannya sebagai fakta yuridis (*juridical fact*).²⁰ Ketika beberapa orang mengikatkan dirinya secara bersama dan bertindak dengan cara tertentu untuk tujuan yang sama maka mereka telah menciptakan suatu tubuh sendiri yang berbeda dengan

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 6th printing, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, (New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd, 2003), hlm. 96.

¹⁶ Ron Harris, "The Transplantation of the Legal Discourse on Corporate Personality Theories: From German Codification to British Political Pluralism and American Big Business," *Washington and Lee Law Review*, vol. 63, no. 4, 2006, hlm. 1424.

¹⁷ Harold J. Laski, "The Personality of Associations," *Harvard Law Review*, vol. 29, no. 4, 1916, hlm. 40.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 110.

¹⁹ Hans Kribbe, "Corporate Personality: A Political Theory of Association," (Disertasi Doktor Hukum School of Economics and Political Science, Inggris, 2014), hlm. 20.

²⁰ Peter A. French, "The Corporation as a Moral Person," *American Philosophical Quarterly*, vol. 16, no. 3, 1979, hlm. 209.

individu-individu yang ada didalamnya, tubuh baru tersebut tercipta bukan karena aksi hukum, tetapi karena sifat dasar dari hal tersebut.²¹

Gierke dan Maitland yang merupakan pelopor pandangan realis menyatakan bahwa sifat yang secara intrinsik harus dimiliki oleh suatu entitas untuk bisa menjadi subjek hukum adalah "*will*" atau kehendak.²² Suatu *legal person* juga adalah suatu entitas yang mampu untuk melakukan sesuatu dengan pertimbangan yang rasional (*reasonable*) atas konsekuensi dari perbuatan tersebut.²³ Apabila entitas tersebut memiliki kehendak yang independen terhadap dirinya sendiri dan dapat mengeksekusi kehendaknya tersebut, maka dia dapat menjadi pengembal hak dan kewajiban dalam hukum. Bukan hukum yang menciptakannya, tugas hukum adalah hanya mengidentifikasi keberadaannya.

Hukum pidana lebih cenderung untuk melihat korporasi sebagai suatu realitas. Mereka dilihat dari kemampuannya untuk berkehendak dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari korporasi tersebut. Korporasi juga bisa dikatakan adalah suatu entitas yang *reasonable* dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan tujuan dari korporasi tersebut. Sepanjang suatu organisasi tersebut ikut serta dalam kehidupan sosial masyarakat, ikut berpartisipasi dalam berbagai peran sosial atau dalam suatu hubungan hukum, terlepas apakah dia berbentuk korporasi (badan hukum) atau bukan, hukum pidana menganggapnya sebagai suatu subjek mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan. Subjek mandiri yang memiliki tujuan yang berbeda dari para anggota yang ada di dalamnya, yang memiliki pilihan-pilihan rasional yang berkaitan dengan tujuan dari korporasi tersebut mengakibatkan korporasi dapat dikatakan sebagai seorang agen moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas namanya sendiri berdasarkan prinsip *personal liability* yang diterima dalam hukum pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana yang Bersifat Personal (Personal Liability)²⁴

Salah satu tujuan pembentukan hukum pidana adalah untuk menghukum individu yang telah melakukan suatu perbuatan yang jahat dan tercela dalam moral, sehingga hanya orang yang menyadari dan menghargai nilai moral dari perbuatannya saja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.²⁵ Suatu agen moral dianggap memiliki kapasitas untuk memahami perbuatan baik dan buruk yang

²¹ Dicey, sebagaimana dikutip dari John Dewey, "The Historic Background of Corporate Legal Personality," *The Yale Law Journal*, vol. 35, no. 6, April 1926, hlm. 673.

²² Dewey, *op. cit.*, hlm. 658. Kehendak sebagai syarat untuk dapat disebut sebagai subjek hukum.

²³ Bryant Smith, "Legal Personality." *Yale Law Journal*. Vol. 37. No. 3. January 1928. 283-299.

²⁴ Wells dan Quick, menggunakan istilah "subjective liability dalam bukunya. Lihat Celia Wells dan Oliver Quick, *Lacey, Wells and Quick: Reconstructing Criminal Law*, Fourth Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 119.

²⁵ Michael S. Moore, *Placing Blame: A General Theory of the Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 33, 35.

dia pilih untuk lakukan atau tidak lakukan.²⁶ Di samping itu, dengan adanya pertimbangan moral dan rasionalitas yang dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut dianggap memiliki kapasitas untuk memperhitungkan atau paling tidak membayangkan konsekuensi dari perbuatan yang dia pilih untuk lakukan.²⁷ Namun hukum pidana juga memperhitungkan tingkat kebebasan individu dalam memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ketika seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu berada di bawah tekanan atau dalam kondisi kejiwaan yang membuatnya tidak berfikir secara rasional, maka pertanggungjawaban pidana akan bergradasi tergantung pada keadaan tertentu tersebut.²⁸

Maksim yang berlaku untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah tidak pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*), *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (Latin), yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “*an act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*” atau “*an act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*.”²⁹ Artinya, bahwa suatu subjek tidak dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana apabila tidak ada unsur kesalahan (*schuld*) pada dirinya yang berdasarkan pada adanya kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana dari subjek tersebut. Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu subjek tidak cukup dengan telah dilakukannya tindak pidana saja (*actus reus*), akan tetapi juga harus ada unsur kesalahan atau sikap batin (*mens rea*) yang dapat dicela yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut.³⁰

Hukum pidana juga dikatakan sebagai mekanisme yang digunakan untuk menjaga ketertiban sosial, sehingga suatu subjek bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana untuk tujuan tersebut.³¹ Seorang subjek hukum pidana akan dinyatakan bertanggung jawab apabila dia telah melanggar kewajiban yang ada pada dirinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan di sekitarnya yang merupakan penerima manfaat dari kewajiban yang dilanggarnya tersebut. Fakta bahwa pelaku tindak pidana tidak memiliki niat yang buruk terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut tidak menjadi pembahasan yang begini

²⁶ Peter Cane, *Responsibility in Law and Morality* (Oxford: Hart Publishing, 2002), hlm. 4, 23.

²⁷ Alan Norrie, *Punishment, Responsibility and Justice: A Relational Critique*, Reprinted, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 1.

²⁸ R.A. Duff, *Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law*, (Oxford: Hart Publishing, 2007).

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 2, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hlm. 33, ada juga ahli yang mengaitkan maksim ini bukan dengan pertanggungjawaban pidana tetapi dengan perbuatannya sebagaimana misalnya Minkes menjelaskan maksim ini dengan “*an act is not wrongful unless accompanied by a wrongful state of mind*”, lihat Minkes, *Corporate and White Collar Crime*. (Los Angeles, USA: Sage, 2008), hlm. 61.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ke-lima, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 57.

³¹ Cane, *op. cit.*, hlm. 36.

ting bagi para penganut pemahaman ini.³² Sehingga pertanggungjawaban tidaklah dikorelasikan dengan niat atau sikap batin dari pelaku tindak pidana tetapi lebih kepada resiko yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya.³³ Pendekatan ini sedikit berbeda dengan pendekatan yang menyatakan hanya *morally blameworthy* yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Kedua pendekatan ini (subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah *morally blameworthy agent* dan dipertanggungjawabkan untuk tujuan ketertiban sosial dengan mengurangi resiko yang dapat merusaknya) akan digunakan sebagai dasar dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi ketika terjadi tindak pidana di dalam korporasi. Sejauhmana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan kriteria apa yang dapat digunakan untuk menyatakan pengurus direksi atau pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Harus ada suatu mekanisme dan kriteria yang jelas mengenai perbedaan antara perbuatan dan subjek yang khusus milik korporasi dan perbuatan dan niat yang spesifik milik pengurus sebagai individu mandiri yang terpisah dari korporasi. Baik korporasi dan pengurus sebagai agen moral maupun sebagai subjek yang ikut dalam pergaulan di dalam masyarakat yang mungkin dapat membawa resiko dalam terganggunya ketertiban sosial yang dijaga oleh hukum pidana.

Analisis Putusan Pengadilan Indonesia tentang Pemisahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus Korporasi

Pada bagian sebelumnya telah dilakukan pembahasan mengenai kedudukan korporasi sebagai pribadi mandiri yang berbeda dari pengurus yang ada di dalamnya. Mereka juga bertindak sebagai agen moral yang dapat bertindak secara rasional berdasarkan tujuan tertentu dari korporasi tersebut. Sehingga berdasarkan pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal maka mereka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang membahayakan ketertiban umum. Meskipun korporasi memiliki tujuan yang berbeda dengan anggota yang ada di dalamnya, tetapi dalam melakukan perbuatan yang diinginkan korporasi memerlukan pengurus yang kewenangannya diberikan atau diizinkan oleh korporasi untuk melakukan perbuatan tertentu. Sehingga dalam tindak pidana yang melibatkan korporasi terdapat dualisme pertanggungjawaban pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi. Bagian ini akan menganalisis putusan pengadilan Indonesia mengenai pemisahan pertanggungjawaban tersebut. Apakah hakim telah menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana personal dalam menjatuhkan sanksi pidana baik bagi korporasi maupun bagi pengurus korporasi.

Ada empat kasus hukum yang akan secara khusus dianalisis dalam tulisan ini, yaitu tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Dongwoo Environmental

³² Ibid. hlm. 55-56.

³³ Catherine Ntsanyu Nana, "Corporate Criminal Liability in the United Kingdom: Determining the Appropriate Mechanism of Imputation," *Dissertation, Aberdeen: Robert Gordon University*, 2009, hlm. 56.

dia pilih untuk lakukan atau tidak lakukan.²⁶ Di samping itu, dengan adanya pertimbangan moral dan rasionalitas yang dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut dianggap memiliki kapasitas untuk memperhitungkan atau paling tidak membayangkan konsekuensi dari perbuatan yang dia pilih untuk lakukan.²⁷ Hukum pidana juga memperhitungkan tingkat kebebasan individu dalam memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ketika seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu berada di bawah tekanan atau dalam kondisi kejiwaan yang membuatnya tidak berfikir secara rasional, maka pertanggungjawaban pidana dia bergradasi tergantung pada keadaan tertentu tersebut.²⁸

Maksim yang berlaku untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah *actus reus* (pidana tanpa kesalahan) (*Geen straf zonder schuld*), *actus non facit reum, nisi mens rea* (Latin), yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “*an act does not make a person guilty of a crime, unless his mind be also guilty*” atau “*an act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*.”²⁹ Artinya, bahwa suatu subjek tidak dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana apabila tidak ada unsur kesalahan (*schuld*) pada dirinya yang berdasarkan pada adanya kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana dari subjek tersebut. Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu subjek tidak cukup dengan telah dilakukannya tindak pidana saja (*actus reus*), akan tetapi juga harus ada unsur kesalahan atau sikap batin (*mens rea*) yang dapat dicela yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut.³⁰

Hukum pidana juga dikatakan sebagai mekanisme yang digunakan untuk menjaga ketertiban sosial, sehingga suatu subjek bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana untuk tujuan tersebut.³¹ Seorang subjek hukum pidana akan dinyatakan bertanggung jawab apabila dia telah melanggar kewajiban yang ada pada dirinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan di sekitarnya yang merupakan penerima manfaat dari kewajiban yang dilanggarnya tersebut. Fakta bahwa pelaku tindak pidana tidak memiliki niat yang buruk terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut tidak menjadi pembahasan yang begitu

²⁶ Peter Cane, *Responsibility in Law and Morality* (Oxford: Hart Publishing, 2002), hlm. 4, 23.

²⁷ Alan Norrie, *Punishment, Responsibility and Justice: A Relational Critique*, Reprinted, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 1.

²⁸ R.A. Duff, *Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law*, (Oxford: Hart Publishing, 2007).

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 2, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hlm. 33, ada juga ahli yang mengaitkan maksim ini bukan dengan pertanggungjawaban pidana nya tetapi dengan perbuatannya sebagaimana misalnya Minkes menjelaskan maksim ini dengan “*an act is not wrongful unless accompanied by a wrongful state of mind*”, lihat Minkes, *Corporate and White Collar Crime*. (Los Angeles, USA: Sage, 2008), hlm. 61.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ke-lima, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 57.

³¹ Cane, *op., cit.*, hlm. 36.

penting bagi para penganut pemahaman ini.³² Sehingga pertanggungjawaban tidaklah selalu dikorelasikan dengan niat atau sikap batin dari pelaku tindak pidana tetapi lebih kepada resiko yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya.³³ Pendekatan ini sedikit berbeda dengan pendekatan yang menyatakan hanya *morally blameworthy agent* yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Kedua pendekatan ini (subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah *morally blameworthy agent* dan dipertanggungjawabkan untuk tujuan ketertiban sosial dengan mengurangi resiko yang dapat merusaknya) akan digunakan sebagai dasar dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi ketika terjadi tindak pidana di dalam korporasi. Sejauhmana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan kriteria apa yang dapat digunakan untuk menyatakan seorang direksi atau pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Harus ada suatu mekanisme dan kriteria yang jelas mengenai perbedaan antara perbuatan dan niat yang khusus milik korporasi dan perbuatan dan niat yang spesifik milik pengurus sebagai individu mandiri yang terpisah dari korporasi. Baik korporasi dan pengurus sebagai agen moral maupun sebagai subjek yang ikut dalam pergaulan di dalam masyarakat yang mungkin dapat membawa resiko dalam terganggunya ketertiban sosial yang dijaga oleh hukum pidana.

3. Analisis Putusan Pengadilan Indonesia tentang Pemisahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus Korporasi

Pada bagian sebelumnya telah dilakukan pembahasan mengenai kedudukan korporasi sebagai pribadi mandiri yang berbeda dari pengurus yang ada di dalamnya. Mereka juga dipandang sebagai agen moral yang dapat bertindak secara rasional berdasarkan tujuan khusus dari korporasi tersebut. Sehingga berdasarkan pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal maka mereka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang membahayakan ketertiban umum. Meskipun korporasi memiliki tujuan yang berbeda dengan anggota yang ada di dalamnya, tetapi dalam melakukan perbuatan yang diinginkan korporasi memerlukan pengurus yang kewenangannya diberikan atau didelegasikan oleh korporasi untuk melakukan perbuatan tertentu. Sehingga dalam suatu tindak pidana yang melibatkan korporasi terdapat dualisme pertanggungjawaban pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi. Bagian ini akan menganalisis putusan pengadilan Indonesia mengenai pemisahan pertanggungjawaban tersebut. Apakah hakim telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana personal dalam menjatuhkan sanksi pidana baik bagi korporasi maupun bagi pengurus korporasi.

Ada empat kasus hukum yang akan secara khusus dianalisis dalam tulisan ini, yaitu tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT, Dongwoo Environmental

³² *Ibid.*, hlm. 55-56.

³³ Constantine Ntsanyu Nana, "Corporate Criminal Liability in the United Kingdom: Determining the Appropriate Mechanism of Imputation," *Dissertation, Aberdeen: Robert Gordon University*, 2009, hlm. 56.

Indonesia (PT. DEI),³⁴ tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group (PT. AAG),³⁵ tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Indosat Media (PT. IM2),³⁶ dan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Adei Plantation & Industry (PT. API).³⁷ Tiga kasus hukum diawali dengan pengumuman yang menjadi terdakwa namun korporasi juga dijatuhi sanksi pidana oleh hakim. Sedangkan satu kasus hukum merupakan tindak pidana korporasi tetapi hakim memberikan sanksi pidana pengganti kepada pengurus dalam hal korporasi tidak dapat membayar pidana denda.

a. Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup PT. Dongwoo Environmental Indonesia (PT. DEI)

PT. DEI adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah Gas Berbahaya dan Beracun (B3) yang berdiri semenjak 2001, di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. PT. DEI melakukan pembuangan limbah B3 tanpa pengolahan ke tanah kosong di daerah kampung Sempu, Desa Pasir Gembong, Cikarang Utara, sehingga menyebabkan masyarakat di sekitarnya mengalami kepala pusing, tenggorokan kering, dada sesak, perut mual dan muntah-muntah.

Dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. DEI yang menjadi terdakwa dari awal adalah Kim Young Woo yang merupakan Presiden Direktur PT. DEI, namun dalam amar putusan, hakim memberikan sanksi denda kepada korporasi dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan atas Kim Young Woo.³⁸ Putusan PN Bekasi No. 458/Pid.B/2008/PN.Bks tanggal 22 Juni 2009 menyatakan terdakwa PT. DEI bersalah melakukan tindak pidana "Lingkungan hidup secara berlanjut" dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.325 juta, substitusi 6 bulan kurungan, serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan penutupan PT. DEI. Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya No. 465/Pid/2009/PN.Bks tanggal 3 Desember 2009 dan Putusan MA No. 862 K/PID.SUS/2010 tanggal 7 April 2011, menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah dengan memperberat pidana denda menjadi Rp.600 juta.

Tidak ada pembahasan mengenai pemisahan subjek hukum antara korporasi dan subjek hukum manusia di dalam putusan hakim dalam kasus ini, sepertinya mereka dilihat sebagai subjek hukum yang sama dan bisa dipertukarkan (*interchangeable*). Kurang tepat mencampuradukkan kedua subjek hukum ini diperlakukan seolah-olah adalah seperti subjek hukum yang sama, bisa dipidana untuk mengganti pertanggungjawaban dari subjek hukum yang lain. Apabila memang hakim dalam putusan ini berpandangan Kim Young Woo adalah *directing mind* dari perusahaan sehingga perusahaannya bisa dipidana.

³⁴ *Indonesia v Kim Young Woo*. Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/PID.SUS/2010.

³⁵ *Indonesia v. Suwir Laut*. Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012.

³⁶ *Indonesia v Indar Atmanto*. Putusan MA No. 787K/PID.SUS/2014.

³⁷ *Indonesia v PT. Adei Plantation & Industry (PT. API)*. Putusan MA No. 2042K/Pid.Sus/2015.

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 862 K/PID.SUS/2010, hlm. 95.

yang dipertanggungjawabkan adalah perusahaan dan yang harus dipidana adalah manusia. Di samping itu penuntutan terhadap kedua subjek hukum (PT. DEI dan Han Heng Woo) seharusnya dilakukan baik secara terpisah (*splitsing*) maupun disatukan. *Dalam hal pembuktian kedua subjek hukum harus diuji secara masing-masing dan pemenuhan unsur-unsur pidana.*

Kasus Tindak Pidana Perpajakan PT. Asian Agri Group (PT. AAG)

Hal yang sama juga ditemui dalam kasus perpajakan PT. AAG, yang menjadi terdakwa dan diperiksa adalah subjek manusia (Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak) *manajer* PT. AAG, tetapi yang diberikan sanksi adalah juga Perusahaannya.³⁹ Kasus ini berawal dari tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam PT. AAG yang melakukan rekayasa laporan keuangan untuk menghindari kewajiban perpajakan. PT. AAG didakwa telah secara sengaja menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan untuk mencapai nama 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung di dalam AAG.

Putusan kasus ini menurut penulis sebenarnya merupakan salah satu putusan yang sangat kaya akan pertimbangan hukum dari hakim yang mengadili (Hakim Agung Djoko Sarwoko, Hakim Agung Komariah E. Sapardjaja, dan Hakim Agung H. Murwahyuni), menguraikan unsur-unsur pidana dengan sangat detail dan mengkomodir cukup banyak doktrin hukum dalam analisis kasus perpajakan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah PT. AAG ini.

Dalam pertimbangannya hakim mengakui bahwa secara formal korporasi tidak terdakwa dalam kasus ini,⁴⁰ tetapi dengan pertimbangan tujuan pemidanaan UU Perpajakan adalah bukan untuk tujuan retributif kepada pelaku individual tetapi lebih kepada pemenuhan rasa keadilan agar korporasi dapat membayar Pajak Penghasilan dan Pajak Badan untuk kepentingan penerimaan negara, maka hakim juga memberikan sanksi pidana kepada korporasi untuk membayar *dua kali* (dua) kali pajak terhutang perusahaan.⁴¹

Pelaku individual Suwir Laut dalam kasus ini diberikan sanksi pidana penjara *dua kali* (dua) tahun, dengan masa percobaan berkelakuan baik selama 3 (tiga) tahun. Walaupun menurut hakim pelaku individual dalam kasus ini dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab, tetapi sanksi yang diterima oleh pelaku individual sudah cukup mengurangi stigma kriminal pada subjek individual dengan diberikan masa percobaan. Menurut penulis, dan mungkin juga hakim dalam kasus ini, subjek individual sebenarnya berada dalam posisi sebagai subjek yang dipergunakan atau *diperalat* oleh korporasi untuk melakukan tindak pidana guna mencapai maksudnya menghindari kewajiban pajak. Atau kalau bukan diperalat, mungkin dibujuk oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi. Meskipun subjek individu melakukan

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2239 K/Pid.SUS, hlm. 474.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 472.

⁴¹ *Ibid.*, 472-473.

perbuatan tersebut dengan sadar, namun menurut penulis tingkat *free will* pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut dipengaruhi juga oleh kenyataan bahwa pelaku bekerja dan dibayar oleh korporasi.

c. Kasus Tindak Pidana Korupsi PT. IM2

Kasus selanjutnya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan PT. IM2. PT. IM2 adalah anak perusahaan PT. Indosat. PT. IM2 dituntut telah membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat untuk menghindari kewajiban PT. IM2 membayar *Up Front Fee* dan Biaya Hak Penggunaan (BPH) pita frekuensi radio 3G kepada Negara dengan kerugian negara sebesar Rp.1.358.343.346.674. Dalam kasus ini juga dari awal yang menjadi terdakwa adalah pengurus korporasi, yaitu Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT. IM2.

Dalam kasus PT. IM2 hakim yang mengadili (Hakim Agung Artidjo Alkoston, Hakim Agung Mohammad Askin, dan Hakim Agung Lumme) berpendapat bahwa subjek hukum manusia (pengurus) dan subjek hukum korporasi adalah merupakan subjek hukum yang dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat kumulatif-ateratif, sehingga mereka dapat dipertukarkan dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidana dan dalam hal penjatuhan sanksi pidana.⁴² Sehingga meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasinya (IM2), tetapi terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur utama PT. IM2 dianggap telah merugikan negara dengan tindakannya membuat perjanjian mengenai pembagian frekuensi radio dengan PT. Indosat, sehingga PT. IM2 dapat diberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti meskipun tidak pernah dituntut.⁴³

Penulis berpendapat bahwa hakim kurang tepat dalam pandangannya mengenai kedudukan subjek hukum korporasi dan subjek hukum manusia yang ada di dalam korporasi sebagai dua subjek hukum yang dapat dipertukarkan, sehingga pembuktian terhadap kesalahan salah satu subjek secara otomatis akan menjadikan subjek yang lainnya juga adalah bersalah atas suatu tindak pidana yang dituduhkan padanya. Tidak adil untuk menyatakan suatu subjek bersalah atas suatu tindak pidana tanpa adanya pemeriksaan atau pengujian mengenai keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah dibahas juga pada sub bab sebelumnya bahwa ada hak-hak dari korporasi yang juga harus dipenuhi dalam pembuktian dan proses pengadilan pidana yang memang belum diakomodasi oleh hukum acara di Indonesia.

d. Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup PT. Adei Plantation & Industry (PT. API)

PT. API adalah pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten Pelalawan dan Bengkalis Propinsi Riau. Mereka didakwa telah melakukan tindak pidana lingkungan

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 787 K/PID.SUS/2014, hlm. 142 dan hlm. 175.

⁴³ *Ibid.*

hidup berupa penimbunan anak sungai untuk perluasan lahan serta pembakaran untuk mempersiapkan lahan. Kegiatan tersebut telah menyebabkan kebakaran yang luas dan menghasilkan kabut asap yang mencemari udara melebihi batas ambang pencemaran, merusak sifat kimia tanah, merusak sifat biologi tanah, merusak sifat fisik tanah, merusak aspek flora.

Apabila dalam beberapa kasus yang telah dibahas di atas korporasi ikut diberikan sanksi pidana padahal yang dituntut, didakwa dan diperiksa di pengadilan adalah subjek hukum manusia di dalam korporasi; hal sebaliknya terjadi pada kasus tindak pidana lingkungan hidup PT. API. Pada kasus ini yang dijadikan terdakwa dari awal adalah PT. API yang diwakili oleh Tan Kei Yoong selaku *managing director*. PT. API dinyatakan telah lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sehingga hakim pada Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi memberikan sanksi pidana denda kepada PT. API sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) “dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang diwakili oleh Sdr. Tan Kei Yoong selama 5 (lima) bulan.”⁴⁴

Hakim dalam putusan PT. API menjelaskan:

“Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah korporasi atau badan usaha yang tidak mungkin dikenai pidana badan/fisik, maka sebagai penanggung jawab tertinggi pada PT. API... maka Sdr. Tan Kei Yoong adalah pihak yang dianggap tepat untuk menjalani pidana pengganti kurungan tersebut.”⁴⁵

Dalam hal ini Tan Kei Yoong yang dari awal tidak pernah diperiksa sebagai pelaku tindak pidana, dapat menggantikan sanksi pidana denda yang diberikan kepada PT. API. Hakim dalam hal ini melihat bahwa subjek korporasi dan subjek manusia yang mewakili korporasi adalah sama. Sehingga apabila korporasi tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya membayar pidana denda maka dapat digantikan oleh wakilnya dengan pidana kurungan. Pemahaman seperti ini menurut penulis sangat keliru dan berbahaya bagi kepastian hukum dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa kasus di atas jelas menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan hakim dalam menentukan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan ketika tindak pidana terjadi dalam kerangka kegiatan korporasi. Hakim cenderung melihat korporasi sebagai *interchangeable* dengan pengurus korporasi. Pemahaman ini sangat keliru mengingat korporasi adalah subjek yang berbeda dengan pengurus korporasi, mereka seharusnya dituntut dan dibuktikan kesalahannya atas namanya sendiri. Tidak adil untuk menyatakan suatu subjek bersalah atas suatu tindak pidana tanpa adanya pemeriksaan atau pengujian mengenai keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Putusan No. 286/Pid.Sus/2014/PT.PBR, hlm. 53.

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, Putusan No. 228/Pid.Sus/2013/PN Plw, hlm. 213.

4 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Prinsip *Personal Liability*

Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tidak banyak literatur yang melakukan pembahasan secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal (*personal liability*) atau kesalahan pribadi (*subjective culpability*) dari korporasi.⁴⁶ Salah satu penyebabnya adalah karena pandangan yang sudah diterima dalam ilmu hukum bahwa korporasi adalah suatu fiksi atau entitas yang ada hanya dalam kontemplasi hukum, sehingga sulit untuk menjelaskan kehendak atau unsur mental dari korporasi. Sedangkan hukum pidana sebagaimana telah dibahas di atas memperhitungkan unsur mental yang relevan untuk menyatakan suatu subjek dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pada beberapa kondisi tertentu pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada pandangan bahwa korporasi dipertanggungjawabkan tanpa perlu melakukan pembahasan mengenai unsur mental dari korporasi itu sendiri atau dikenal dengan *strict criminal liability*. Mereka dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah resiko terganggunya ketertiban sosial masyarakat yang ditimbulkan dari perbuatan yang mereka lakukan dengan menghilangkan unsur subjektif dari pertanggungjawaban pidana dan lebih fokus kepada *objective-driven enforcement*.⁴⁷

Sedangkan untuk tindak pidana yang memerlukan mental elemen atau unsur kesalahan, hakim pada kasus-kasus awal yang mempertanggungjawabkan korporasi menggunakan prinsip *vicarious criminal liability*. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious criminal liability*) merupakan ajaran yang diambil dari hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan doktrin *respondent superior*.⁴⁸ Menurut doktrin *respondent superior*, seorang pemberi kuasa (*principal*) dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa (*agent*), sebagai perbuatan dari agent tersebut adalah dalam batas kewenangannya.⁴⁹ Ketentuan mengenai adanya hubungan kerja antara pelaku dengan organisasi (*agent* dari organisasi) dan ketentuan mengenai *scope of employment* merupakan bagian dari ajaran atribusi (*Police Attribution*). Dimana korporasi dianggap tidak memiliki kapasitas sendiri untuk dapat

⁴⁶ Constantine Ntsanyu Nana, *op. cit.*, hlm. 53.

⁴⁷ Brent Fisse and John Braithwaite, *Corporation, Crime and Accountability* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993), hlm. 54. Lihat juga James Gobert dan Maurice Punch, *Rethinking Corporate Crime*, (London, UK: Butterworths, 2003).

⁴⁸ Ketentuan mengenai hubungan majikan dan bawahan 'respondent superior' (latin) – *let the master answer*. Lihat Brandon L. Garrett, (1) *Too Big Too Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations* (London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014), hlm. 4. *Vicarious liability* sebenarnya memiliki cakupan yang lebih luas daripada *respondent superior*, karena *vicarious liability* meliputi semua bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orang lain, sedangkan *respondent superior* terbatas hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Lihat pembahasan mengenai hal ini misalnya pada James R. Schirott dan Sherry K. Drew, "The Vicarious Liability of Public Officials Under the Civil Rights Act," *Akron Law Review*, 2015, vol. 8, issue 1.

⁴⁹ Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 84.

melakukan sesuatu, sehingga diperlukan suatu aturan yang menjelaskan bahwa tindakan dari agen manusia di dalam korporasi dapat diatribusikan dan dianggap sebagai tindakan dari korporasinya sendiri.

Pembatasan dari doktrin *vicarious criminal liability* adalah doktrin identifikasi yang dikembangkan pada pengadilan di Inggris. Menurut doktrin identifikasi, korporasi diidentifikasi melalui orang-orang penting atau pimpinan dari korporasi tersebut, orang-orang penting ini disebut sebagai *legal alter ego* dari korporasi, sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan kesalahan dari mereka.⁵⁰ Korporasi akan dinyatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana hanya apabila salah satu dari para personel pengendali bersalah (memenuhi standar *actus reus* dan *mens rea*) sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.⁵¹

Dalam perkembangannya korporasi tidak lagi dilihat hanya sebagai suatu fiksi, tetapi lebih sebagai suatu realitas yang juga memiliki niat sendiri dan melakukan suatu perbuatan yang rasional. Korporasi dianggap memiliki kapasitas yang cukup untuk dapat melakukan pertimbangan dalam menghubungkan konsekuensi dengan perbuatannya dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai moral masyarakat yang dituangkan dalam norma hukum pidana. Karena korporasi adalah subjek mandiri dengan segala kapasitasnya maka dapat dikatakan bahwa ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana maka mereka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.⁵²

Berdasarkan pandangan bahwa korporasi adalah entitas mandiri dengan segala kapasitasnya maka pada tahapan selanjutnya pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi didasarkan pada pertanggungjawaban pidana tidak langsung (*indirect liability*) seperti doktrin *vicarious criminal liability* ataupun doktrin identifikasi, tetapi mulai mengarah kepada pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability*) berdasarkan doktrin agregasi⁵³ dan budaya perusahaan (*corporate culture*). Berdasarkan pandangan ini, pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan kepada kesalahan organisasi (*organizational fault*) yang bertanggung jawab atas kebijakan, prosedur dan sistem mereka sendiri.⁵⁴

Menurut doktrin agregasi, suatu organisasi dapat memiliki kehendak sendiri atau kehendak group (*group intention*) yang dapat ditelusuri dari gabungan

⁵⁰ Pieth dan Ivory, "Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview," dalam Mark Pieth dan Radha Ivory (editor), *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence and Risk* (London: Springer, 2011), hlm. 22.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 58.

⁵² Pieth dan John Braithwaite, *op. cit.*, hlm. 45.

⁵³ Mark Pieth dan Radha Ivory, *op. cit.*, hlm. 6-7. Bedakan dengan Cavanagh yang berpandangan bahwa doktrin agregasi adalah bagian dari pertanggungjawaban turunan dari pandangan nominalist yang menyatakan bahwa korporasi merupakan suatu fiksi yang terdiri dari gabungan individu. Neil, "Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault," *The Journal of Criminal Law*, 75, 2011, hlm. 414.

⁵⁴ Cavanagh, *op. cit.*, hlm. 415.

kehendak atau perbuatan kolektif dari beberapa orang di dalam korporasi.⁵⁵ Doktrin agregasi lebih merefleksikan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai suatu pertanggungjawaban yang ditimbulkan oleh suatu mekanisme organisasi yang menunjukkan sistem pengambilan keputusan di dalam korporasi. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan meskipun tidak ada satu pengurus secara spesifik yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana ataupun mengetahui adanya fakta yang berkaitan sehingga memungkinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.⁵⁶ Beberapa pendapat menjelaskan bahwa doktrin agregasi lebih cocok untuk digunakan dalam hal *mens rea* dari beberapa orang di dalam korporasi dikumpulkan (sebagai agregat) untuk dapat memenuhi tingkat kesalahan yang diperlukan untuk melakukan penuntutan yang kadangkala kalau menggunakan doktrin identifikasi hal ini tidak dapat dilakukan.⁵⁷

Doktrin selanjutnya yang berasal dari pemahaman realis dari korporasi adalah doktrin budaya korporasi. Menurut doktrin budaya korporasi, suatu korporasi dapat memiliki kesalahan sendiri apabila korporasi tersebut memiliki sistem atau budaya yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.⁵⁸ Korporasi sebagai subjek mandiri dapat memiliki kesalahan yang berasal dari dirinya sendiri dan tidak selalu berasal dari individu tertentu yang bekerja untuk organisasi tersebut.⁵⁹ Menurut Fisse dan Braithwaite, budaya korporasi ini ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa terpengaruh dengan pergantian personel atau anggota korporasi.⁶⁰ Budaya perusahaan bisa dilihat secara formal pada prosedur dan kebijakan perusahaan, atau secara informal dari bagaimana budaya tersebut mempengaruhi tindakan dan tingkah laku individu di dalam korporasi.⁶¹

Pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan dengan kewajiban personal korporasi meskipun pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada gabungan beberapa tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pengurus sebagai agen dari korporasi berdasarkan prinsip atribusi (*rules of attribution*), baik tindakan tersebut dilakukan sendiri maupun bersama-sama dalam perannya sebagai agen dari korporasi. Hal ini berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pengurus dalam hal terjadi tindak pidana di dalam korporasi. Pengurus dalam kapasitasnya sebagai agen akan memberikan

⁵⁵ Pieth dan Ivory, *op. cit.*, hlm. 22.

⁵⁶ Cavanagh, *op. cit.*, hlm. 425.

⁵⁷ Mike Molan, Denis Lanser dan Duncan Bloy, *Bloy and Parry's Criminal Law*, Fourth Edition, (London: Cavendish Publishing Limited, 2000), hlm. 141, Cavanagh, *op. cit.*, hlm. 426-427.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

⁵⁹ Rick Sarre (1), "Penalising Corporate 'culture': The Key to Safer Corporate Activity?" dalam Jane Gobert dan Ana-Maria Pascal (editor), *European Developments in Corporate Criminal Liability*, (Oxford: Routledge, 2011), hlm. 86.

⁶⁰ Fisse dan Braithwaite, *op. cit.*, hlm. 22.

⁶¹ Rick Sarre (2), "White-Collar Crime and Prosecution," dalam Hendry N. Pontell dan Gilbert Geis (editor), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, (New York, USA: Springer, 2007), hlm. 650.

implikasi kepada pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi pengurus sebagai individual yang mandiri memiliki alasan dan rasionalitas sendiri kita melakukan atau ikut serta dalam suatu tindak pidana yang melibatkan dirinya dan korporasi. Pada bagian selanjutnya akan dianalisis bagaimana seorang pengurus korporasi dapat juga dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi tindak pidana di dalam korporasi.

6. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi

Korporasi dalam melakukan aktivitasnya memang membutuhkan subjek manusia pengurusnya melalui prinsip agensi dan atribusi). Dari pemahaman inilah kemudian muncul pertanggungjawaban tidak langsung (*indirect liability*) dari korporasi, di mana perbuatan dan kesalahan pengurus ditarik menjadi perbuatan dan kesalahan korporasi (*vicarious liability* dan *identification doctrine*).

Adanya pertanggungjawaban pidana korporasi tidak diharapkan akan menjadi pelepas tanggung jawab (*scapegoats*) dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus korporasi.⁶² Sehingga pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi tetap harus dapat dijelaskan dalam konteks suatu tindak pidana yang dilakukan korporasi agar seorang pelaku tindak pidana tidak bisa berlindung di balik pertanggungjawaban pidana korporasi.⁶³ Selain itu adanya pertanggungjawaban pidana pengurus dapat memberikan implikasi agar pengurus lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan korporasi dan dalam mengambil suatu keputusan di dalam korporasi.⁶⁴

Namun dalam kenyataannya pengendali korporasi tidak dapat dikatakan otomatis bersalah apabila korporasi melakukan suatu tindak pidana. Para pengurus hanya akan dapat dipersalahkan apabila yang bersangkutan memang telah melakukan suatu tindak pidana (komisi) atau tidak melakukan kewajiban (omisi) yang ada pada dirinya sehingga terjadinya tindak pidana tersebut.⁶⁵

Beberapa kriteria seperti adanya persetujuan (*consent*), persekongkolan (*connivance*), atau disebabkan karena kelalaian (*neglect*) dari direktur, manajer, sekretaris, atau pengurus organisasi lainnya, atau pihak lain yang bertindak dalam kapasitas yang sama, dalam terjadinya tindak pidana korporasi, maka individu tersebut harus juga dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut sesuai dengan perannya. Ketentuan mengenai adanya persetujuan (*consent*), persekongkolan (*connivance*), atau kelalaian (*neglect*) dari pengurus terhadap terwujudnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan syarat

⁶² Neil Foster, "Individual Liability of Company Officers." Dalam James Gobert dan Ana-Maria Pascal (editor). *European Developments in Corporate Criminal Liability*. (Oxon: Routledge, 2011), hlm. 118.

⁶³ James Gobert, "Squaring the Circle: the Relationship between Individual and Organizational Fault," dalam James Gobert dan Ana-Maria Pascal (editor), *European Developments in Corporate Criminal Liability*, (Oxon: Routledge, 2011), hlm. 143.

⁶⁴ Patrick Bernau, "Decision and Punishment: Or – Hold Bankers Responsible!: Corporate Criminal Liability from Economic Perspective," dalam Dominik Brodowski, et al (editors), *Regulating Corporate Criminal Liability*, (Dorrecht: Springer, 2014), hlm. 48.

⁶⁵ Pinto dan Evans, *Corporate Criminal Liability*, (London: Sweet & Maxwell, 2003), hlm. 75.

yang banyak dimasukkan dalam beberapa peraturan Inggris untuk mengatribusikan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus atau direksi.⁶⁶ Ketentuan yang sama misalnya juga dimuat pada Section 18 (1) *Theft Act 1968* dan *Theft Act 1978*, Section 20 *Trade Descriptions Act 1968*, Section 14 *Company Director's Disqualification Act 1986*, Section 9 (3) *Knives Act 1997*.

Peraturan Indonesia memang belum mengatur mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi. Tetapi upaya untuk itu sudah mulai dilakukan oleh beberapa instansi penegak hukum seperti misalnya PERJA tentang Subjek Hukum Korporasi pada lampiran menjelaskan kriteria perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a) Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan atau membantu melakukan tindak pidana;
- b) Orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan tetapi tidak melakukan tindakan tersebut, dan menyadari bahwa terdapat resiko yang cukup besar dengan pembiaran tersebut;
- c) Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya resiko yang cukup besar, cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi.

Pengaturan mengenai hal ini sangat penting untuk menjelaskan kriteria dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Telah cukup banyak pembahasan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus ketika ada tindak pidana korporasi belum cukup banyak dijelaskan sehingga dalam prakteknya aparat penegak hukum termasuk juga hakim cukup kesulitan dalam memisahkan kedua subjek hukum ini.

C. Penutup

Korporasi sebagai suatu entitas yang mandiri adalah aktor sosial yang memiliki tujuan yang berbeda dengan anggota yang ada di dalamnya. Dalam melakukan hubungan sosial dan hubungan hukum, korporasi dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan kepada mereka. Hukum pidana yang pada awalnya diciptakan untuk subjek manusia kemudian beradaptasi dengan kebutuhan akan adanya satu mekanisme yang memungkinkan mengatur perilaku korporasi sehingga sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana secara umum berdasarkan kepada kesalahan yang bersifat personal, artinya seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab dalam hukum

⁶⁶ *Ibid.*, 81-83.

pidana hanya apabila telah memenuhi standar *actus reus* dan *mens rea* yang ditentukan. Dalam melakukan aktifitasnya korporasi selalu bertindak melalui pengurusnya, namun mereka seharusnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kesalahan yang dilakukan oleh pengurus sendiri, tetapi atas suatu kesalahan yang dilakukan secara struktural oleh korporasi. Sehingga korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana apabila terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa korporasi melakukan tindak pidana, atau apabila korporasi memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana, misalnya dengan mendorong, menyuruh, membujuk, memfasilitasi atau membantu agennya untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Meskipun dalam hukum pidana sudah diterima pertanggungjawaban korporasi, tetapi pengurus korporasi sebagai agen dari korporasi tidak dapat berlindung dibalik pertanggungjawaban pidana korporasi apabila dia memiliki peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana. Pengurus juga dipandang sebagai individu yang rasional, yang mengambil suatu keputusan berdasarkan pemahaman akan konsekuensi yang akan diterimanya dengan melakukan pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Hal ini lah yang seharusnya dibuktikan oleh hakim ketika mereka dihadapkan pada suatu kasus hukum yang melibatkan korporasi. Hakim dan jaksa seharusnya menjelaskan secara lengkap bagaimana peran korporasi dan pengurus korporasi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga setiap subjek dipertanggungjawabkan sesuai dengan porsi kesalahan mereka masing-masing, bukan dengan sebuah penyederhanaan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh direksi otomatis adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi atau sebaliknya. Apalagi penyederhanaan pandangan bahwa kedua subjek ini adalah dapat dipertukarkan dalam hal pembuktian kesalahan, pertanggungjawaban dan penjatuhan sanksi pidana. Padahal masing-masing subjek adalah subjek mandiri yang berbeda baik dalam pikiran atau tujuan maupun dalam tindakan yang diambil.

D. Referensi

- Brandon L. Garrett, (1) *Too Big Too Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations*, (London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014).
- Cane, Peter. *Responsibility in Law and Morality* (Oxford: Hart Publishing, 2002).
- Coranagh, Neil. "Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Models of Fault," *The Journal of Criminal Law*, 75, 2011.
- Constantine Ntsanyu Nana, "Corporate Criminal Liability in the United Kingdom: Determining the Appropriate Mechanism of Imputation," *Dissertation, Aberdeen: Robert Gordon University*, 2009.
- Diebert, Katrin. "Corporate Criminal Liability in France," dalam Mark Pieth dan Radha Ivory (editor), *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence and Risk*, (London: Springer, 2011).

- Departemen Hukum dan HAM, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2015.
- Dewey, John. "The Historic Background of Corporate Legal Personality," *The Yale Law Journal*, vol. 35, no. 6, April 1926.
- Duff, R.A. *Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law* (Oxford: Hart Publishing, 2007).
- Fisse, Brent and John Braithwaite, *Corporation, Crime and Accountability* (Cambridge UK: Cambridge University Press, 1993).
- Foster, Neil. "Individual Liability of Company Officers." Dalam James Gobert dan Ana-Maria Pascal (editor). *European Developments in Corporate Criminal Liability* (Oxon: Routledge, 2011).
- French, Peter A. "The Corporation as a Moral Person," *American Philosophical Quarterly*, vol. 16, no. 3, 1979.
- Gobert, James dan Maurice Punch, *Rethinking Corporate Crime*, (London, UK: Butterworths, 2003).
- Gobert, James. "Squaring the Circle: the Relationship between Individual and Organizational Fault," dalam James Gobert dan Ana-Maria Pascal (editor). *European Developments in Corporate Criminal Liability*, (Oxon: Routledge, 2011).
- Harris, Ron. "The Transplantation of the Legal Discourse on Corporate Personality Theories: From German Codification to British Political Pluralism and American Big Business," *Washington and Lee Law Review*, vol. 63, no. 4, 2006.
- Indonesia v Indar Atmanto*. Putusan MA No. 787K/PID.SUS/2014.
- Indonesia v Kim Young Woo*. Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/PID.SUS/2014.
- Indonesia v PT. Adei Plantation & Industry* (PT. API). Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Putusan No. 286/Pid.Sus/2014/PT.PBR, hlm. 53.
- Indonesia v PT. Adei Plantation & Industry* (PT. API). Putusan MA No. 2042K/Pid.Sus/2015.
- Indonesia v. Suwir Laut*. Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012.
- Indonesia, *Undang-Undang Paten*, UU No. 13/2016, LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922.
- Indonesia, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, LN No. 242 Tahun 2017, TLN No. 6141.
- Indonesia, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, LN. No. 106 Tahun 2017, TLN No. 6055.
- Indonesia, UU No. 7/2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
- Indonesia, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, LN. No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Perpu No. 1/2002, LN. No. 106 Tahun 2002, TLN

No. 4232. Sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, LN. No. 45 Tahun 2003, TLN. 4284.

Indonesia. *Undang-Undang Narkotika*. UU No. 35/2009. LN. No. 143. TLN. No. 5062.

Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31/1999. LN No. 140 Tahun 1999. TLN No. 3874, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2001. LN No. 134 Tahun 2001. TLN No. 4150.

Indonesia. *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8/2010. LN No. 122 Tahun 2010.

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32/2009 LN. No. 140 Tahun 2009. TLN. No. 5059.

Indonesia. *Undang-Undang Psikitropika*. UU No. 5/1997. LN. No. 10 Tahun 1997. TLN. No. 3671.

Tricot, Juliette. "Corporate Liability and Compliance Programs in France," dalam Manacorda, Centonze dan Forti (editor), *Preventing Corporate Corruption: The Anti-Bribery Compliance Model*, (Switzerland: Springer, 2014).

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, 6th printing, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, (New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd, 2003).

Kribbe, Hans. "Corporate Personality: A Political Theory of Association," (Disertasi Doktor London School of Economics and Political Science, Inggris, 2014).

Laski, Harold J. "The Personality of Associations," *Harvard Law Review*, vol. 29, no. 4, 1916.

Ling Zhang, *The Comparative Research of Organizational Crime in Japan and China* (2004, Japanese).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 862 K/PID.SUS/2010.

Mark Pieth dan Radha Ivory, "Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview," dalam Mark Pieth and Radha Ivory (editor), *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence and Risk*, (London: Springer, 2011).

McAuley, Duberley and Johnson, *Organization Theory: Challenges and Perspectives*, (England: Pearson Education, 2007).

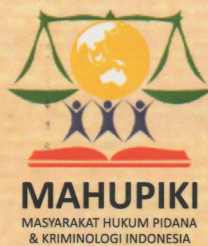
Minkes, *Corporate and White Collar Crime*. (Los Angeles, USA: Sage, 2008).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ke-lima, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993..

Molan, Mike., Denis Lanser dan Duncan Bloy, *Bloy and Parry's Criminal Law*, Fourth Edition, (London: Cavendish Publishing Limited, 2000).

- Moore, Michael S. *Placing Blame: A General Theory of the Criminal Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2010).
- Nani Mulyati, "Korporasi sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia," Disertasi Universitas Indonesia, 2018.
- Norrie, Alan. *Punishment, Responsibility and Justice: A Relational Critique*, Reprinted (Oxford: Oxford University Press, 2004).
- Patrick Bernau, "Decision and Punishment: Or – Hold Bankers Responsible? Corporate Criminal Liability from Economic Perspective," dalam Dominik Brodowski, et al (editors), *Regulating Corporate Criminal Liability*, (Dordrecht: Springer, 2014).
- Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Putusan No. 286/Pid.Sus/2014/PT.PBR.
- Pinto and Evans. *Corporate Criminal Liability*. (London: Sweet & Maxwell, 2003).
- Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan, Putusan No. 228/Pid.Sus/2013/PN Plw.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumnus, 1986).
- Reiss, Jr. dan Michael Tonry, "Organizational Crime," *Crime and Justice*, vol. 18, 1993.
- Sarre, Rick (2), "White-Collar Crime and Prosecution," dalam Hendry N. Ponder dan Gilbert Geis (editor), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, (New York, USA: Springer, 2007).
- Sarre, Rick. (1). "Penalising Corporate 'culture': The Key to Safer Corporate Activities," dalam James Gobert dan Ana-Maria Pascal (editor), *European Developments in Corporate Criminal Liability*, (Oxon: Routledge, 2011).
- Schirott, James R. dan Sherry K. Drew, "The Vicarious Liability of Public Officials Under the Civil Rights Act," *Akron Law Review*, 2015, vol. 8, issue 1.
- Schrager dan Short, "Toward a Sociology of Organizational Crime," *Social Problems*, vol. 25, issue 4, 1978.
- Shover, Neal, and Andy Hochstetler (2002) "Cultural Explanation and Organizational Crime." *Crime, Law, and Social Change*, vol. 37.
- Smith, Bryant. "Legal Personality." *Yale Law Journal*. Vol. 37. No. 3. January 1928.
- Sutan Remy Sjahdeini (1), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 2, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007).
- Wells, Celia dan Oliver Quick, *Lacey, Wells and Quick: Reconstructing Criminal Law* Fourth Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

GENTA
PUBLISHING
Literatur Hukum Indonesia



ISBN 978-602-1500-93-4



